



PETA MUTU PENDIDIKAN MADRASAH BERDASARKAN AKREDITASI QUALITY OF MADRASAH EDUCATION BASED ON ACCREDITATION

Budi Susetyo¹, Cut N. Ummu Athiyah²

¹Departemen Statistika, Institut Pertanian Bogor,

²Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

¹email: budisu@apps.ipb.ac.id,

²email: ummu@mhs.uinjkt.ac.id



<https://doi.org/10.36052/andragogi.v9i1.223>

Diterima: 8 Mei 2021 | Disetujui: 2 Juni 2021 | Dipublikasikan: 30 Juni 2021

Abstrak

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis peta mutu madrasah di seluruh Indonesia berdasarkan hasil akreditasi BAN-S/M tahun 2018 dan 2019. Hasil analisis data akreditasi menunjukkan bahwa secara nasional mutu madrasah meningkat, akan tetapi sangat bervariasi antar provinsi, antar jenjang, antar jenis madrasah dan antar status madrasah. Hasil akreditasi menunjukkan bahwa lebih dari 80% MI terakreditasi minimal B pada tahun 2018 dan 2019, MTs pada tahun 2019 mencapai 79.5% terakreditasi minimal B, sedangkan MA baru mencapai 73,3%. Provinsi yang memiliki mutu baik di seluruh jenjang madrasah, yaitu di DI Yogyakarta, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Sebaliknya masih terdapat 10 provinsi yang rata-rata mutunya rendah, dimana madrasah yang terakreditasi minimal B dibawah 50%. Hasil lain dari akreditasi menunjukkan mutu madrasah baru lebih rendah dibandingkan dengan madrasah yang reakreditasi, dan mutu madrasah swasta secara rata-rata mutunya lebih rendah dibandingkan madrasah negeri. Secara umum standar mutu pendidikan yang masih kurang adalah Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SPT) dan Standar Sarana dan Prasarana (SSP).

Kata Kunci: Akreditasi; Penjaminan mutu pendidikan; Standar nasional pendidikan

Abstract

[QUALITY OF MADRASAH EDUCATION BASED ON ACCREDITATION]. The purpose of this article is to analyse a map of the quality of madrasah throughout Indonesia based on the results of accreditation in 2018 and 2019. The results of analysis show that nationally the quality of madrasahs has increased. However, the quality of madrasah varies greatly between provinces, levels, types of madrasah and madrasah status. The accreditation results show that more than 80% of MI accredited at least B in 2018 and 2019, MTs in 2019 has reached 79.5%, while MA has only reached 73.3%. Provinces that have good quality at all levels of madrasah: DI Yogyakarta, West Java and DKI Jakarta. In contrast, there are still 10 provinces that have a low quality, where madrasah accredited at least B is below 50%. Another result shows that the average fulfillment of the 8 quality standards for new madrasah is lower than that of re-accredited madrasah, the quality of private madrasah is lower than public madrasah. In general, the standards of education that are still low are the standards for teachers and education personnel and the standards for facilities and infrastructure.

Keywords: Accreditation; Education Quality Assurance; National Education Standards



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Tujuan Pendidikan di Indonesia adalah membangun manusia seutuhnya. Pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan yang berkualitas telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan yang mengacu kepada standar mutu yang telah disepakati, yaitu standar nasional pendidikan. (Pasal 31 UUD 1945).

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 menyebutkan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam pasal 35 disebutkan standar nasional pendidikan terdiri atas delapan standar antara lain: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar Isi (SI) adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai SKL pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar Proses (SPR) adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai SKL Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SPT) adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Standar Sarana dan Prasarana (SSP) adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar Pengelolaan

(SPL) adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar Pembiayaan (SB) adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Standar Penilaian Pendidikan (SPN) adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Pemerintah telah menunjuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk melakukan pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan. Pemerintah juga mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. (PP Nomor 19/2005).

Banyak definisi mutu dalam dunia pendidikan. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan konsep yang beragam. Terminologi mutu yang bisa disematkan diantaranya adalah efisiensi, efektivitas, kesetaraan dan kualitas istilah sering digunakan secara sinonim (Adams, 1993). Dalam konteks pendidikan di Indonesia, yang dimaksud dengan mutu pendidikan adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan dengan SNP (PP 19 tahun 2005).

Penjaminan Mutu Pendidikan dapat dimaknai sebagai mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. Penjaminan mutu yang efektif bagi pengembangan sekolah memastikan kepemilikan proses melalui dialog dan tindakan yang bermakna, dan sebuah kesempatan untuk berpikir dan berkreasi 'di luar kotak', (ET2020 Working Group Schools, 2018).

Berdasarkan dua pengertian di atas maka definisi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang saling berinteraksi



secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri dari dua jenis yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan oleh semua komponen dalam satuan pendidikan dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standardisasi pendidikan (Permendikbud Nomor 28/2016). Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan hasil akreditasi juga menjadi pendorong bagi madrasah untuk melakukan evaluasi diri dalam pemenuhan mutu 8 SNP. ([Damanik](#), Jafriansen. 2015).

Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal menyebutkan bahwa Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Oleh karenanya BAN-S/M merupakan salah satu dari SPME.

Hasil akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN-S/M) merupakan indikator untuk menilai pencapaian mutu pendidikan berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. Beberapa indikator lain yang mencerminkan mutu pendidikan, baik pada sekolah umum maupun madrasah telah banyak dipublikasikan, misalnya tentang hasil ujian nasional. Berdasarkan hasil ujian nasional dari tahun 2015 sampai dengan 2019, rata-rata nilai ujian nasional mengalami penurunan baik di MTs maupun di MA (Renstra Kemenag Tahun 2020-2024). Hal yang sama juga terjadi di sekolah umum dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Indikator lainnya, misalnya skor PISA juga menunjukkan kemampuan siswa Indonesia dibidang matematika, IPA dan literasi membaca masih rendah.

Beberapa penelitian tentang hubungan antara hasil akreditasi dengan ujian nasional (UN) telah dilakukan. Dalam penelitian [Setiawan](#), Susetyo dan Fitrianto (2018) menyimpulkan bahwa standar nasional

pendidikan yang mempengaruhi terhadap hasil UN jenjang SMP/MTs adalah standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar penilaian. Pada jenjang SMA/MA, [Ramadhan](#), Susetyo dan Indahwati (2019) menyimpulkan bahwa standar sarana dan prasarana, standar guru dan tenaga kependidikan dan standar kelulusan mempengaruhi hasil UN. Selanjutnya [Susetyo](#) dan Rezi (2021) menelusuri lebih lanjut dan menyimpulkan bahwa pengaruh pemenuhan standar nasional terhadap hasil UN bervariasi antar wilayah di Indonesia.

Dari sekitar 270 ribu populasi satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, sekitar 19 % diantaranya adalah madrasah yang melayani sekitar 16% dari sekitar 53 juta populasi peserta didik. Berdasarkan data tahun 2019 terdapat 52,483 lembaga (MI, MTs dan MA) yang melayani sekitar 8,3 juta peserta didik (Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024). Dengan demikian mutu madrasah jelas akan berpengaruh besar terhadap mutu pendidikan secara nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tulisan ini akan menganalisis dan membahas hasil akreditasi madrasah yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN-S/M) untuk menggambarkan peta mutu pendidikan madrasah di Indonesia berdasarkan jenjang, status sekolah, antar provinsi, tingkat pemenuhan standar nasional dan permasalahannya. Dari studi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk pengambilan kebijakan di tingkat pusat, wilayah dan satuan pendidikan.

METODE PENELITIAN

BAN-S/M setiap tahun melakukan akreditasi satuan pendidikan pada jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Pada tahun 2018 dan 2019, prioritas sasaran akreditasi adalah sekolah/madrasah baru yang belum pernah diakreditasi (sasaran baru) dan sekolah/madrasah yang telah habis sertifikat masa akreditasinya (reakreditasi). Data yang dianalisis dalam artikel ini adalah data hasil

akreditasi madrasah tahun 2018 dan tahun 2019 dengan perincian seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah madrasah yang diakreditasi tahun 2018 dan 2019

Sasaran	Tahun 2018			Tahun 2019			Jumlah	Persen
	MI	MTs	MA	MI	MTs	MA		
Baru	2.329	1.453	884	1.104	1.188	710	7.668	30,14
Reakreditasi	4.771	1.678	846	5.222	3.386	1.867	17.770	69,86
Jumlah	7.100	3.131	1.730	6.326	4.574	2.577	25.438	100,00

Sumber: Diolah dari laporan BAN-S/M tahun 2018 dan 2019

Secara keseluruhan terdapat 25.438 data madrasah yang dianalisis, yang terdiri dari 13.426 MI, 7.705 MTs dan 4.307 MA. Dari total madrasah tersebut, sekitar 30% diantaranya adalah madrasah sasaran baru, 70% reakreditasi.

Variabel yang dianalisis adalah hasil penilaian asesor berdasarkan visitasi ke madrasah dengan menggunakan instrument/perangkat yang sudah ada. Perangkat akreditasi yang digunakan untuk penilaian didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/H/AK/2017, Nomor 003/H/AK/2017 dan Nomor 004/H/AK/2017. Jumlah butir pernyataan yang digunakan untuk dasar penilaian pemenuhan 8 standar dan penetapan peringkat akreditasi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah butir pernyataan dalam perangkat akreditasi setiap jenjang

No.	Standar	MI	MTs	MA
1	Standar Isi (SI)	10	9	9
2	Standar Proses (SPR)	21	21	21
3	Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	7	7	7
4	Standar Pendidik dan Tendik (SPT)	16	19	19
5	Standar Sarana dan Prasarana (SSP)	21	24	28
6	Standar Pengelolaan (SPL)	15	15	16
7	Standar Pembiayaan (SB)	16	16	16
8	Standar Penilaian Pendidikan (SPN)	13	13	13
Jumlah		119	124	129

Sumber: Diolah dari laporan BAN-S/M tahun 2018 dan 2019

Untuk jenjang MI terdapat 119 butir pernyataan, jenjang MTs 124 butir dan MA 129 butir. Setiap butir pernyataan dinilai dengan skala likert (0,1,2,3,4), kemudian hasil penilaian per butir digunakan untuk menghitung skor masing-masing standar pendidikan dan nilai akreditasi (NA). Nilai akhir digunakan untuk memberikan peringkat A (Unggul), B (Baik), C (Cukup) atau TT (Tidak terakreditasi).

Madrasah akan memperoleh peringkat A jika $91 \leq NA \leq 100$, B jika $81 \leq NA \leq 90$, C jika $71 \leq NA \leq 80$ dan TT jika $NA < 71$. Skor penilaian

setiap butir pernyataan merupakan nilai yang diberikan oleh dua orang asesor yang melakukan pengumpulan data dan informasinya melalui wawancara, pengamatan dan penilaian dokumen di madrasah. Metode analisis dilakukan dengan metode eksploratif dan kualitatif untuk mendapatkan *mapping* mutu madrasah secara nasional, antar provinsi, antar jenjang, dan antar status sekolah. Selanjutnya dianalisis bagaimana tingkat pemenuhan 8 standar nasional pendidikannya dan aspek-aspek apa yang masih lemah dari 8 standar tersebut.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Temuan

Dalam dokumen perencanaan kementerian, misalnya dokumen Rencana Strategis, hasil akreditasi sekolah/madrasah pada umumnya digunakan sebagai salah satu indikator kinerja mutu pendidikan. Indikator kinerja mutu yang ditargetkan meningkat setiap tahun antara lain persentase sekolah/madrasah yang terakreditasi minimal B. Selain untuk digunakan mengukur kinerja mutu suatu kementerian, perolehan hasil akreditasi juga dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Sedangkan untuk satuan pendidikan, hasil akreditasi juga digunakan sebagai prasyarat suatu sekolah/madrasah untuk dijadikan sebagai satuan pendidikan percontohan.

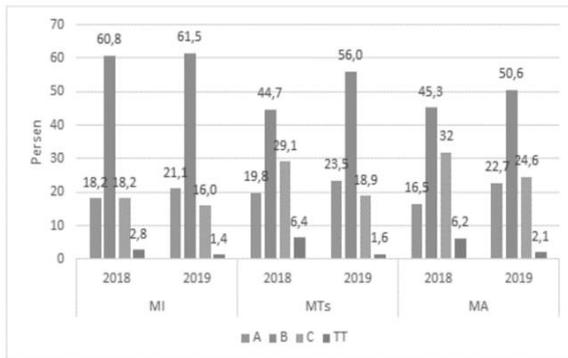
Berdasarkan hasil akreditasi BAN-S/M pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan bahwa tahun 2019 lebih baik dari tahun 2018, dimana terdapat 79,7% madrasah (MI, MTs dan MA) yang memperoleh peringkat akreditasi minimal B, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 72,8%. Selain daripada itu madrasah yang hasilnya Tidak Terakreditasi (TT) menurun dari 4,2% menjadi 1,6% (Tabel 3).

Tabel 3. Persentase peringkat akreditasi per jenjang tahun 2018 dan 2019

Jenjang	Peringkat (%) Tahun 2018				Jumlah Madrasah	Peringkat (%) Tahun 2019				Jumlah Madrasah
	A	B	C	TT		A	B	C	TT	
MI	18,2	60,8	18,2	2,8	6.822	21,1	61,5	16,0	1,4	6.326
MTs	19,8	44,7	29,1	6,4	2.982	23,5	56,0	18,9	1,6	4.574
MA	16,5	45,3	32,0	6,2	1.635	22,7	50,6	24,6	2,1	2.577
Total (%)	18,4	54,4	23,0	4,2	11.439	22,2	57,5	18,7	1,6	13.477

Sumber: Diolah dari data hasil akreditasi BAN-S/M

Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah, yayasan, satuan pendidikan dan masyarakat terhadap mutu madrasah secara nasional sudah membuahkan hasil yang baik. Namun demikian, pencapaian tersebut masih dalam bentuk agregat nasional. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut hasil akreditasi per jenjang, per provinsi, dan menurut status sekolah.



(Sumber: diolah dari data hasil akreditasi BAN-S/M)
Gambar 1. Distribusi peringkat akreditasi antar jenjang tahun 2018 dan 2019

2. Pembahasan

Distribusi hasil akreditasi antar jenjang dan antar tahun (Gambar 1) menunjukkan Peta mutu pendidikan berdasarkan peringkat akreditasi pada jenjang MI pada tahun 2018 dan

2019 hampir sama. Persentase MI yang terakreditasi B antara tahun 2018 dan 2019 sekitar 61%. MI yang memperoleh peringkat A pada tahun 2019 meningkat sekitar 3% dibandingkan tahun 2018, sedangkan yang memperoleh peringkat C menurun sekitar 2% dan TT menurun 1,4%. Pada jenjang MTs, terjadi peningkatan mutu cukup signifikan pada 2019. Persentase MTs yang memperoleh peringkat A pada tahun 2019 meningkat sekitar 4%, peringkat B meningkat sekitar 8%, peringkat C menurun 10%, dan yang TT menurun sekitar 5%. Perubahan mutu hasil akreditasi pada MA dari tahun 2018 ke 2019 tidak sebesar seperti pada MTs. MA yang terakreditasi A tahun 2019 meningkat sekitar 4%, peringkat B tetap, peringkat C turun sekitar 4% dan TT turun sekitar 3%. Dari ketiga jenjang tersebut dapat disimpulkan bahwa, mutu MI yang terakreditasi minimal B sudah melampaui 80% sejak tahun 2018, MTs pada tahun 2019 sudah mencapai sekitar 80%, sedangkan MA masih sekitar 73%. Secara nasional dapat dikatakan bahwa rata-rata mutu MA masih kurang dibandingkan dengan MTs dan MI.

Tabel 4. Persentase peringkat akreditasi madrasah hasil tahun 2018 dan 2019

No	Provinsi	MI			Jml MI	MTS			Jml MTs	MA			Jml MA
		A+B	C	TT		A+B	C	TT		A+B	C	TT	
1	DI YOGYAKARTA	97,6	2,4	-	42	94,9	1,7	3,4	59	83,3	16,7	-	30
2	JAWA TENGAH	94,0	5,8	0,2	2.048	85,6	13,2	1,3	720	77,2	22,1	0,7	267
3	JAWA BARAT	93,4	5,9	0,7	2.249	90,4	9,2	0,4	1.450	91,2	7,4	1,5	814
4	DKI JAKARTA	91,6	6,2	2,2	178	93,3	3,3	3,3	120	95,9	2,0	2,0	49
5	ACEH	86,2	11,2	2,6	196	51,5	33,1	15,4	136	67,0	29,6	3,5	115
6	JAWA TIMUR	82,8	16,4	0,8	4.279	69,7	28,8	1,5	1.137	62,7	35,6	1,7	724
7	NUSA TENGGARA BARAT	77,3	21,1	1,7	418	82,3	16,4	1,3	317	76,2	23,4	0,4	273
8	KALIMANTAN SELATAN	74,1	23,2	2,6	228	82,2	14,4	3,4	118	55,0	33,8	11,3	80
9	SULAWESI SELATAN	73,4	26,6	-	421	61,8	36,8	1,5	408	55,9	43,2	0,9	222
10	BANTEN	72,5	26,5	1,0	505	71,1	25,3	3,6	530	55,1	40,3	4,7	236
11	SUMATERA UTARA	72,1	27,6	0,3	660	77,8	19,0	3,2	474	86,4	13,6	-	250
12	KALIMANTAN TIMUR	72,1	23,5	4,4	68	74,3	25,7	-	70	82,1	14,3	3,6	28
13	BALI	68,0	32,0	-	25	84,2	15,8	-	19	83,3	16,7	-	24
14	MALUKU UTARA	68,0	30,0	2,0	50	62,2	37,8	-	82	36,4	63,6	-	22
15	SUMATERA BARAT	66,1	22,0	11,9	59	85,7	14,3	-	98	73,3	23,8	2,9	105
16	PAPUA	62,5	37,5	-	16	33,3	33,3	33,3	6	41,7	50,0	8,3	12
17	GORONTALO	61,9	26,2	11,9	42	71,0	25,8	3,2	31	68,8	25,0	6,3	16
18	LAMPUNG	61,9	35,7	2,4	378	62,8	35,4	1,8	333	62,4	35,3	2,4	85
19	SUMATERA SELATAN	59,2	37,6	3,2	311	58,9	38,8	2,3	214	45,6	50,0	4,4	160
20	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	57,1	14,3	28,6	7	75,0	25,0	-	12	60,0	10,0	30,0	10
21	MALUKU	54,5	33,3	12,1	66	45,2	30,6	24,2	62	46,4	53,6	-	28
22	KALIMANTAN BARAT	54,2	29,2	16,7	120	49,3	37,3	13,3	75	69,3	20,8	9,9	101
23	NUSA TENGGARA TIMUR	52,2	40,3	7,5	67	44,6	51,8	3,6	56	23,1	69,2	7,7	13
24	KEPULAUAN RIAU	50,0	21,4	28,6	28	37,5	58,3	4,2	24	45,0	40,0	15,0	20
25	RIAU	49,6	37,6	12,8	234	57,5	29,3	13,1	259	67,0	29,2	3,8	209
26	SULAWESI TENGAH	48,0	38,4	13,6	125	56,2	32,0	11,8	178	46,1	41,7	12,2	115
27	BENGKULU	45,5	45,5	9,1	55	43,5	30,4	26,1	23	54,8	35,5	9,7	31
28	KALIMANTAN TENGAH	43,0	44,8	12,2	172	40,7	48,8	10,5	86	35,2	44,4	20,4	54
29	PAPUA BARAT	42,9	57,1	-	21	20,0	80,0	-	10	71,4	14,3	14,3	7
30	SULAWESI BARAT	42,1	45,6	12,3	114	39,4	51,9	8,7	104	23,6	54,5	21,8	55
31	JAMBI	40,6	55,7	3,8	106	26,5	64,6	8,8	113	34,3	55,2	10,4	67
32	SULAWESI UTARA	36,7	46,7	16,7	30	41,2	47,1	17,6	17	33,3	61,9	4,8	21
33	KALIMANTAN UTARA	29,4	58,8	11,8	17	30,0	20,0	50,0	10	12,5	62,5	25,0	8
34	SULAWESI TENGGARA	24,2	42,9	33,0	91	42,4	30,3	27,3	99	23,2	42,9	33,9	56

Sumber: diolah dari data BAN-S/M

Meskipun hasil penilaian akreditasi MI dan MTs secara nasional cukup baik, akan tetapi perlu ditelusuri lebih lanjut bagaimana variasi mutu antar provinsi. Berdasarkan analisis data lebih rinci menunjukkan bahwa mutu MI dan MTs antar provinsi sangat bervariasi. Demikian juga meskipun mutu MA secara nasional masih kurang, akan di beberapa provinsi menunjukkan rata-rata mutu yang baik (Tabel 4).

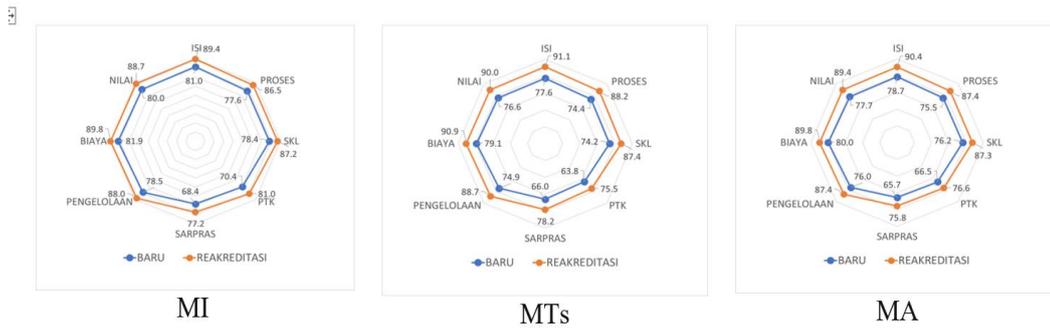
Mutu MI yang baik secara nasional disebabkan oleh kontribusi dari 6 provinsi yang sebagian besar madrasahnya terakreditasi minimal B, antara lain: DI Yogyakarta (97.4%), Jawa Tengah (94%), Jawa Barat (93.4), DKI Jakarta (91.6), Aceh (86.2%) dan Jawa Timur (82.8). Jumlah populasi MI di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur sangat besar dibandingkan di provinsi lainnya. Sebaliknya, masih terdapat 10 provinsi yang perlu memperoleh perhatian khusus karena persentase perolehan akreditasi minimal B masih dibawah 50%, antara lain: Sulawesi Tenggara (24,2%), Kalimantan Utara (29,4%), Sulawesi Utara (36.7%), Jambi (40,6%), Sulawesi Barat (42,1%), Papua Barat (42,9%), Kalimantan Tengah (43%), Bengkulu (45,5%), Sulawesi Tengah (48%) dan Riau (49,6%). Jika diperhatikan hasil akreditasi pada jenjang MTs dan MA di 10 provinsi tersebut, hasilnya juga konsisten dengan jenjang MI. Jika dipetakan secara regional, madrasah di wilayah Sulawesi secara umum mutunya masih tertinggal dibandingkan dengan di regional pulau lainnya.

Dari 6 provinsi yang mayoritas memiliki mutu MI baik, tidak selamanya diikuti dengan mutu MTs dan MA baik. Sebagai contoh Aceh dan Jawa Timur memiliki mutu MTs dan MA yang tidak sebaik MI. Sebaliknya terdapat provinsi yang rata-rata mutu MI tidak terlalu baik, akan tetapi mayoritas mutu MTs nya bagus, yaitu Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Bali dan Sumatera Barat. Beberapa provinsi yang mayoritas mutu MA baik antara lain DI Yogyakarta, Jawa Barat, DKI, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Bali. Jadi dari 34 provinsi, hanya 3 provinsi yang memiliki mutu madrasah baik di semua jenjang, yaitu DI Yogyakarta, DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-S/M tidak hanya memberikan penilaian terhadap hasil akhir peringkat akreditasi. Hasil lain dari

akreditasi adalah memberikan penilaian terhadap tingkat pemenuhan terhadap 8 standar nasional pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar pemangku kepentingan mengetahui kekuatan dan kelemahan dari madrasah dan selanjutnya dapat menentukan prioritas kebijakan dalam rangka perbaikan mutu madrasah. Hasil akreditasi dan rekomendasinya dapat digunakan oleh madrasah dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM). Bagi madrasah swasta, hasil akreditasi dapat digunakan juga oleh yayasan dalam menentukan prioritas pengembangan, sedangkan bagi Kementerian Agama di tingkat pusat maupun wilayah, hasil akreditasi dapat digunakan untuk menentukan kebijakan pembinaan dan penganggaran.

Seperti pembahasan sebelumnya bahwa pada tahun 2018 dan 2019, BAN-S/M memiliki skala prioritas mengakreditasi sekolah dan madrasah yang belum pernah diakreditasi (sasaran baru) kemudian prioritas berikutnya adalah sekolah dan madrasah yang telah habis masa akreditasinya (reakreditasi). Hasil akreditasi menunjukkan bahwa skor 8 standar nasional pendidikan bagi MI, MTs dan MA sasaran baru lebih rendah dibandingkan madrasah rekrreditasi. Terdapat beberapa penyebab mutu madrasah sasaran baru lebih rendah dibandingkan dengan madrasah rekrreditasi. Pertama, mayoritas madrasah sasaran baru berada di daerah terpencil sehingga sumber daya dan prasarana yang dimiliki sangat terbatas. Kedua, madrasah tersebut selama ini tidak diusulkan menjadi sasaran akreditasi oleh Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dan tidak ada kemauan pihak madrasah untuk diakreditasi karena sudah diperkirakan hasilnya akan tidak terakreditasi. Ketiga, madrasah tersebut sudah memperoleh ijin berdiri meskipun belum memenuhi syarat minimal terselenggaranya proses pembelajaran yang baik. Diantara 8 standar nasional pendidikan, yang paling rendah tingkat pemenuhannya adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan (SPT) dan standar sarana dan prasarana (SSP). Fenomena bahwa madrasah sasaran baru memiliki mutu lebih rendah dari madrasah rekrreditasi terjadi di semua jenjang (Gambar 2).

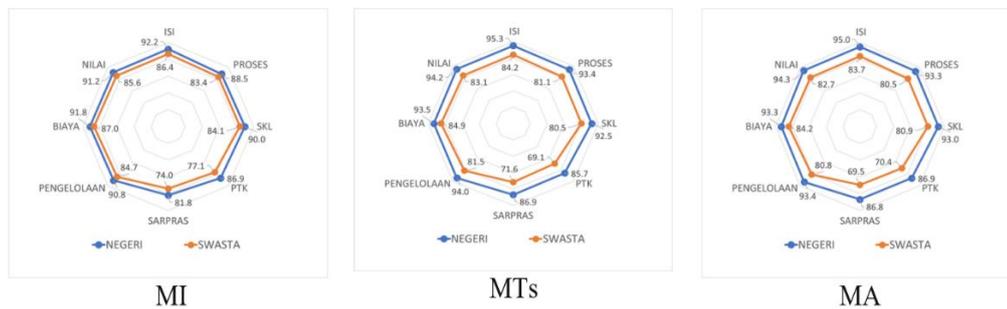


Sumber: Diolah dari data hasil akreditasi BAN-S/M

Gambar 2. Pemenuhan standar nasional pendidikan berdasarkan jenis sasaran

Penelitian ini juga melakukan analisis untuk membandingkan mutu antara madrasah swasta dan madrasah negeri. Analisis ini sangat penting mengingat jumlah madrasah swasta sekitar 90% dari jumlah keseluruhan madrasah. Hasil akreditasi tahun 2018 dan 2019 menunjukkan bahwa secara rata-rata madrasah swasta memiliki tingkat pemenuhan 8 standar lebih rendah dari madrasah negeri di seluruh jenjang (Gambar 3). Dari 8 standar tersebut,

maupun untuk pemenuhan sarana dan prasarana, sedangkan madrasah swasta banyak yang hanya mengandalkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) saja. Hasil ini sejalan dengan analisis yang merekomendasikan perhatian terhadap madrasah swasta perlu ditingkatkan. Diperlukan keseriusan dan upaya yang sungguh-sungguh dari pihak yayasan sebagai penyelenggara madrasah swasta untuk memperbaiki mutu baik input, proses, maupun



Sumber: Diolah dari data hasil akreditasi BAN-S/M

Gambar 3. Pemenuhan standar pendidikan berdasarkan status madrasah

madrasah negeri secara rata-rata telah memenuhi 8 standar dengan baik (skor >80), sedangkan madrasah swasta rata-rata tingkat pencapaian yang masih kurang (<80) adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan (SPT) dan standar sarana dan prasarana (SSP). Pencapaian skor 8 standar ini relevan dengan hasil pencapaian peringkat akreditasi, dimana jenjang MA memiliki skor lebih rendah dibandingkan MI dan MTs.

Penyebab mutu madrasah swasta secara rata-rata lebih rendah dari negeri antara lain dari sumber pembiayaan. Madrasah negeri selain memperoleh dana BOS, juga mendapatkan bantuan pendanaan dari anggaran pemerintah, baik untuk gaji guru

outputnya. Selain itu Kemenag maupun Kemendiknas perlu juga memberikan perhatian khusus kepada madrasah. Karena peserta didik madrasah swasta pun merupakan aset bangsa yang tidak boleh diabaikan. (Faridah Alawiyah, 2014)

Analisis butir hasil akreditasi, diperoleh informasi bahwa persoalan yang menyebabkan masih rendahnya pemenuhan terhadap standar pendidik dan tenaga kependidikan antara lain: kekurangan guru yang memiliki sertifikat pendidik; banyaknya guru yang mengajar tidak sesuai bidangnya; kekurangan tenaga administrasi sesuai syarat yang ditentukan (MTs dan MA); kekurangan tenaga perpustakaan (MTs dan MA); kekurangan guru bimbingan dan

konseling (MTs dan MA); dan kekurangan laboran (MTs dan MA). Sedangkan persoalan pada rendahnya capaian standar sarana dan prasarana antara lain: luas lahan tidak sesuai ketentuan; kekurangan daya listrik; kekurangan luas lantai dan terbatasnya prasarana yang diperlukan; kekurangan ruang perpustakaan (MTs dan MA); kekurangan ruang penunjang; dan kekurangan ruang laboratorium (MTs dan MA).

PENUTUP

1. Simpulan

Sebagaimana diketahui bahwa banyak indikator yang digunakan untuk menilai mutu dari suatu sekolah atau madrasah. Salah satu indikator yang sering dijadikan gambaran peta mutu pendidikan adalah hasil akreditasi yang dilakukan oleh BAN-S/M. Dalam dokumen rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, salah satu indikator capaian kinerja adalah persentase sekolah/madrasah yang terakreditasi minimal B. Madrasah yang terakreditasi minimal B diinterpretasikan sudah mendekati atau memenuhi 8 standar nasional pendidikan.

Hasil analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, berdasarkan hasil akreditasi secara nasional mutu madrasah mengalami perbaikan dari tahun 2018 ke tahun 2019, artinya persentase madrasah yang terakreditasi minimal B mengalami peningkatan. Kedua, mutu madrasah sangat bervariasi antar jenjang pendidikan, provinsi, jenis sasaran dan status madrasah. Mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) secara nasional dan secara rata-rata lebih baik dari Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan MTs lebih baik dari Madrasah Aliyah (MA). Ketiga, mutu madrasah di beberapa provinsi sangat baik, sebaliknya di beberapa provinsi lain masih sangat kurang. Madrasah di provinsi DI Yogyakarta, Jawa Barat dan DKI mayoritas sudah memenuhi 8 standar pendidikan di semua jenjang. Di beberapa provinsi lain terdapat mutu madrasah baik hanya di beberapa jenjang saja. Yang perlu memperoleh perhatian adalah masih terdapat 10 provinsi, dimana kurang dari 50% madrasah terakreditasi minimal B artinya mayoritas masih

jauh memenuhi standar nasional pendidikan. Keempat, madrasah sasaran baru yang baru pertama kali diakreditasi, mutunya masih jauh dibawah dari madrasah yang statusnya sudah pernah diakreditasi (reakreditasi). Kelima, mutu madrasah negeri, pada umumnya lebih baik dari madrasah swasta. Keenam, standar pendidikan yang masih belum dipenuhi oleh banyak madrasah adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar sarana dan prasarana.

2. Rekomendasi

Hasil akreditasi harus dijadikan sebagai masukan bagi pemangku kepentingan pendidikan, baik ditingkat madrasah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menjadi acuan kebijakan dalam peningkatan mutu madrasah.

Hasil dari analisis ini, penulis merekomendasikan beberapa hal kepada Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama tingkat provinsi/kabupaten/kota, Yayasan dan satuan pendidikan. Pertama, mengingat mayoritas madrasah adalah swasta dan permasalahan utama untuk pemenuhan mutu pendidikan adalah keterbatasan anggaran maka direkomendasikan agar Kementerian Agama mencari terobosan payung hukum agar pemerintah daerah juga diperbolehkan atau tidak ragu memberikan bantuan biaya untuk madrasah. Yang terjadi di lapangan adalah masih banyaknya pemda provinsi/kabupaten/kota tidak berani memberi bantuan pembiayaan kepada madrasah akibat masih adanya persepsi bahwa urusan madrasah adalah urusan Kementerian Agama yang tidak didesentralisasikan ke daerah. Pemda khawatir akan terjadi penyimpangan terhadap peraturan perundangan apabila memberikan bantuan ke madrasah. Kedua, mengingat madrasah swasta ada dibawah yayasan, maka perlu dilakukan penyadaran kepada yayasan agar tidak menjadikan madrasah yang masih berkembang dan sumber pendanaannya masih terbatas hanya dari BOS dan sumber dana lain yang terbatas, sebagai sumber pendanaan yayasan. Justru direkomendasikan agar yayasan mencarikan pendanaan sumber lainnya untuk peningkatan mutu madrasah, khususnya untuk sarana dan prasarana dan tenaga kependidikan.



Ketiga, mengingat kemampuan manajerial kepala madrasah sebagai ujung tombak kemajuan madrasah masih rendah, agar dilakukan peningkatan kompetensi kepala madrasah melalui keikutsertaan dalam diklat penguatan kepala madrasah. Keempat, dalam pemilihan kepala madrasah baru maupun perekrutan guru dan tenaga kependidikan baru agar dilakukan secara selektif, sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan. Kelima, Agar dilakukan penguatan madrasah dalam menyusun perencanaan anggaran madrasah (RKAS) yang berbasis visi dan misi madrasah dan hasil evaluasi diri madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, D. (1993). *Defining educational quality. Improving Educational Quality Project Publication #1: Biennial Report*. Arlington, VA: Institute for International Research.
- Alawiyah, Faridah (2014). *Pendidikan Madrasah di Indonesia*. Jurnal Aspirasi Volume V tahun 2014. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi>
- ET2000 Working Group School, *Quality assurance for school development Guiding principles for policy development on quality assurance in school education* https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/Governance/2018-wgs2-quality-assurance-school_en.pdf
- Damanik, J. (2015). *Upaya dan Strategi Pemenuhan SNP*. J D P, Volume 8, Nomor 3, November 2015: 151-160. <https://core.ac.uk/download/pdf/236428747.pdf>
- Indonesia, S. (2003) *UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Indonesia.
- Indonesia, S. (2005) *PP No. 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan*. Indonesia.
- Kemenag. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Agama*. Indonesia
- Kemendikbud. (2016) *Permendikbud nomor 28 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*. Indonesia.
- Kemendikbud. (2017) *Permendikbud nomor 002/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)*. Indonesia.
- Kemendikbud. (2017) *Permendikbud nomor 003/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)*. Indonesia.
- Kemendikbud. (2017) *Permendikbud nomor 004/H/AK/2017 tentang tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)*. Indonesia.
- Kemendikbud. (2018) *Permendikbud nomor 13/2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal*. Indonesia.
- Ramadhan, A., Susetyo, B. dan Indahwati. (2019) 'Penerapan metode klasifikasi random forest dalam mengidentifikasi faktor penting penilaian mutu pendidikan', *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(2), h, 162–182. doi: 10.24832/jpnk.v4i2.1327.
- Sa'adah, A. A., Indahwati dan Susetyo, B. (2019) 'Multivariate random forest to identify the importance variable of 8 national education standards toward national examination of student high school in indonesia', *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research*, 48(6), h. 174–183.
- Setiawan, I. A., Susetyo, B. dan Fitrianto, A. (2018) 'Application of Generalized Structural Component Analysis to Identify Relation between Accreditation and National Assessment', *International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology*, 4(10), h. 93-97. doi: 10.32628/18410IJSRSET.
- Susetyo, B. dan Rezi, W. (2021) 'Application of the fuzzy clusterwise generalized structured component method to evaluate implementation of national education standard in Indonesia', *Management Science Letters*, 11(4), h. 1379-1384. doi: 10.5267/j.msl.2020.11.002.